



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Rabu, 20 September 2017

Eks Napi Korupsi Jadi Pejabat, 15 Anggota DPRD Siapkan Interpelasi

Ambon - Hingga saat ini tercatat 15 anggota DPRD Kota Ambon terlibat langsung dalam persiapan interpelasi untuk nantinya akan diusulkan ke pimpinan DPRD.

Ke-15 anggota tersebut yang berasal dari Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi Keadilan Nasional serta Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Indonesia.

Interpasi akan diajukan menyusul langkah Walikota Richard Louhenapessy yang tetap membela pejabat eks narapidana korupsi Jacky Talahatu.

Talahatu yang dilantik walikota secara diam-diam sebagai staf ahli awal Agustus lalu tetap diberikan kesempatan mengikuti assessment pejabat struktural yang dilakukan asesor dari Kemenpan dan RB.

Tak hanya itu, pasca menerima hasil assessment dari tim asesor, walikota justru memberi sinyal untuk tetap memberikan Talahatu jabatan.

Talahatu adalah mantan Kepala Inspektorat Kota Ambon yang dihukum satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, yang merugikan negara Rp 161.406. 921. Oleh majelis hakim PN Ambon, Talahatu divonis sejak 19 April 2015 dan mulai menjalani masa tahanan di Lapas Ambon sejak 22 April 2015.

“Sudah ada 15 anggota yang akan mengajukan hak interpelasi. Sesuai aturan itu minimal 5 orang dan lebih dari dua fraksi yang berbeda. Itu artinya kita sudah penuhi syarat, sehingga untuk saat ini kita tengah mempersiapkan poin-poin untuk melakukan hak interpelasi,” tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena kepada *Siwalima* di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (19/9).

Selain itu, Wattimena mengharapkan agar, fraksi lain seperti Fraksi Hanura, Golkar, Nasdem, PPP, juga ikut mendukung hak interpelasi.

“Hak interpelasi ini untuk memperjuangkan, kepentingan masyarakat dalam kaitan juga dengan kebijakan pemkot. Kita berharap kalau diusulkan sesuai dengan tahapan nantinya, dalam paripuran internal kita akan menyampaikannya,” katanya

Dijelaskan, untuk saat ini, 15 anggota DPRD sementara menyusun pokok-pokok pikiran dan juga hal-hal yang berkaitan dengan poin interpelasi.

“Kita berharap dengan interpelasi ini ada kebijakan pemerintah dapat dilakukan pro rakyat dan dapat menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan saat ini,” katanya

Baginya hak interpelasi bukan sesuatu yang istimewa, namun hak interpelasi dilakukan agar supaya rencana kebijakan pemkot dapat berpohak kepada rakyat.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Saat ditanya terkait dengan kapan akan diusulkan untuk diusulkan ke paripurna, Wattimena mengaku, untuk saat ini pihaknya bersama anggota-anggota lagi menggodok pikiran dalam kaitan dengan hak interpelasi, kemudian nantinya dalam pikiran-pikiran itu akan dibawa ke unsur pimpinan DPRD untuk nantinya akan dibawa ke paripurna internal dan dalam lewat paripurna internal itu, apabila ada kesepakatan untuk melakukan interpelasi maka hak interpelasi akan dilaksanakan.

“Kita semua lagi godok bersama anggota-anggota DPRD yang sepakat, untuk melakukan hak interpelasi. Jadi ini bukan per fraksi namun ini anggota yang sudah menandatangani dukungan hak interpelasi seluruh materi akan kita godok disitu,” kata Wattimena

Ia mengaku, proses hak interplesi akan dilakukan, namun harus melalui mekanisme, seperti menyurati pimpinan DPRD lewat Sekwan. Kemudian pimpinan DPRD bersama Sekwan menetapkan jadwal untuk melakukan paripurna internal. “Setelah paripurna internal, maka kita melihat apakah hak interpelasi ini layak atau tidak, kalau layak kita lanjutkan,” ujarnya.

Ia mengaku pihaknya akan secepatnya melakukan hak interpelasi namun harus diperhatikan agenda DPRD secara keseluruhan.

“Bamus kan sudah menetapkan agenda dewan, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan agenda anggota, jadi kita tetap serius untuk melakukan hak interpelasi yang penting tahapan ini kita lalui sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya. **(S-44)**

http://www.siwalimanews.com/post/15_anggota_dprd_siapkan_interpelasi